



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDRAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOOR SIDHARTA
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDRAL
3. NHK : 124885

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.456.197.052

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/250 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/120 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m²/300 m² di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m²/350 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah Seluas 15790 m² di PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 426.330.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m²/54 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
7. Bangunan Seluas 93 m² di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 804.867.052
8. Tanah Seluas 130 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
9. Tanah Seluas 6000 m² di BELITUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 434 m²/400 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 1263 m²/300 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000



12. Bangunan Seluas 28 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 350.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 315.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 77.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 627.810.311

F. HARTA LAINNYA Rp. 364.000.000

Sub Total Rp. 9.190.007.363

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.190.007.363

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.